



BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : Rizky Ananda Putra

No. Mahasiswa : 20130520379

Judul Proposal : **Implementation of the Monitoring Functions by Regional People's Representative Council Againsts Regional Budget Revenue and Expenditure of Kota Yogyakarta in Fiscal Year 2015**

Telah mengikuti Ujian Proposal Skripsi pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 24 Oktober 2016

Dosen Penguji I : Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.

Dosen Penguji II : Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si.

Hasil :

*UJ 32/2016 sudah tidak
berlaku sudah diganti
UJ No 23/2016. perubahannya
masalah diseminasi dgn
UJ yg baru.*

Yogyakarta, 24/10/2016

Dosen Penguji I

Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.

Dosen Penguji II

Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si.

Ketua Jurusan

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.

NB.

1. Surat ini jangan sampai hilang



UNDANGAN UJIAN PROPOSAL

Yogyakarta, 21 Oktober 2016

Hal : Ujian Proposal Skripsi

Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal Skripsi

Kepada Yth:

1. Bapak / Ibu Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.
2. Bapak / Ibu Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menguji proposal Skripsi Mahasiswa:

Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama Lengkap : Rizky Ananda Putra

No. Mahasiswa : 20130520379

Judul Proposal : **Implementation of the Monitoring Functions by Regional People's Representative Council Against Regional Budget Revenue and Expenditure of Kota Yogyakarta in Fiscal Year 2015**

Yang akan di laksanakan besok pada:

Hari/Tanggal : Senin / 24 Oktober 2016

Pukul : 09.00

Tempat : Ruang Dosen Jurusan IP FISIPOL UMY Lantai I

Atas kesediaan Bapak/Ibu dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Awang Darumurti, S.IP., M.Si.

Copy rangkap 3 untuk :

- Dosen Pembimbing
- Dosen Penguji Proposal
- Jurusan Ilmu Pemerintahan



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3577
7182/34

Membaca Surat : Dari Dekan FISIPOL - UMY
Nomor : 0355/A/2/VIII/X/2016 Tanggal : 25 Oktober 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : RIZKY ANANDA PUTRA
No. Mhs/ NIM : 20130520379
Pekerjaan : Mahasiswa FISIPOL - UMY
Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Penanggungjawab : Bambang Eka CW, S.IP., M.Si
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTATION OF THE MONITORING FUNCTIONS BY REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL AGAINTS REGIONAL BUDGET REVENUE AND EXPENDITURE OF KOTA YOGYAKARTA IN FISCAL YEAR 2015

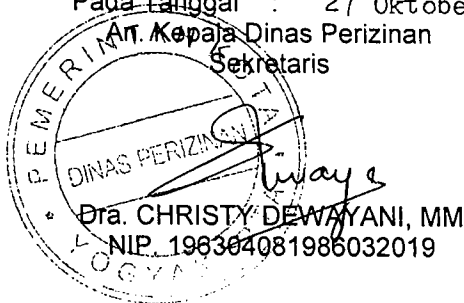
Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 27 Oktober 2016 s/d 27 Januari 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

RIZKY ANANDA PUTRA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 27 Oktober 2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
3. Dekan FISIPOL - UMY
4. Ybs.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3577
7182/34

Membaca Surat : Dari Dekan FISIPOL - UMY
Nomor : 0355/A/2/VIII/X/2016 Tanggal : 25 Oktober 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : RIZKY ANANDA PUTRA
No. Mhs/ NIM : 20130520379
Pekerjaan : Mahasiswa FISIPOL - UMY
Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Penanggungjawab : Bambang Eka CW, S.IP., M.Si
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTATION OF THE MONITORING FUNCTIONS BY REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL AGAINTS REGIONAL BUDGET REVENUE AND EXPENDITURE OF KOTA YOGYAKARTA IN FISCAL YEAR 2015

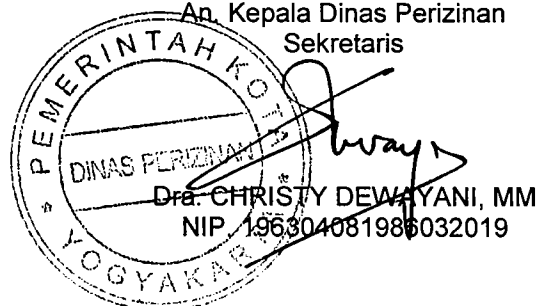
Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 27 Oktober 2016 s/d 27 Januari 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

RIZKY ANANDA PUTRA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 27 Oktober 2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
3. Ka. BAPPEDA Kota Yogyakarta
4. Ka. DPDPK Kota Yogyakarta
5. Dekan FISIPOL - UMY
6. Ybs.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651

Email : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

4. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Penyampaian rancangan KUA PPAS tahun 2014 dan tahun 2016 kepada DPRD tidak tepat waktu.

Tanggapan a :

- Keterlambatan penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun 2014 karena adanya penyempurnaan rancangan KUA dan PPAS pasca penetapan RKPD.

- Kesepakatan bersama penetapan rancangan KUA dan PPAS/ KUPA dan PPAS-P menjadi KUA dan PPAS/ KUPA dan PPAS-P terlambat ditetapkan.

Tanggapan b :

- Keterlambatan penetapan KUA dan PPAS pada tahun 2014 terjadi karena menunggu penetapan RKPD DIY dan RKP Pusat.

- Dokumen KUPA dan PPAS-P tahun anggaran 2015 dan 2016 belum memuat kondisi ekonomi makro daerah.

Tanggapan c :

- Ya, karena terjadinya perubahan anggaran di tahun 2015 dan 2016 bukan diakibatkan oleh perubahan ekonomi makro, sehingga dalam dokumen KUPA dan PPAS-P tahun anggaran 2015 dan 2016 tidak memuat kondisi ekonomi makro daerah. Karena dasar ekonomi makro tersebut masih menggunakan landasan yang termuat pada RKPD.

- Dalam PPAS tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016 tidak ditemukan adanya hasil sinkronisasi kebijakan yang dituangkan dalam tabel 1 dan tabel 2 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013. Tabel 1 adalah tabel tentang sinkronisasi kebijakan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan prioritas nasional. Tabel 2 adalah tabel tentang sinkronisasi kebijakan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan Prioritas Propinsi.

Tanggapan d:

- Ya, karena sinkronisasi prioritas program kebijakan Pemerintah Kota dengan Pemerintah DIY dan Pusat sudah tertuang dalam RKPD. Namun demikian ke depan akan kami tuangkan pula dalam PPAS.

- Lokasi kegiatan pada program yang tercantum dalam PPAS/PPAS-P tidak konsisten/tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKPD.

Tanggapan e :

- Ya, karena perubahan lokasi kegiatan terjadi setelah melalui dinamika pembahasan dengan DPRD. Meskipun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa dalam format PPAS tidak diatur tentang lokasi kegiatan.

Yogyakarta, Oktober 2016
KETUA,

SUJANARKO, SE.

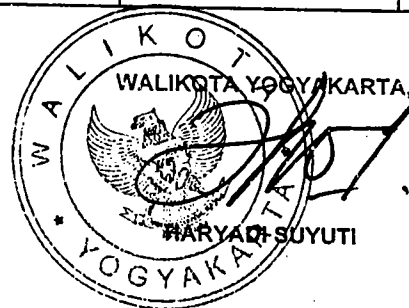
NO	Nama Kegiatan/ Kode Rekening	Nama	Tempat tgl lahir	Pendidikan	Ketugasan / Pekerjaan	Bentuk Perikatan (Kontrak) dan Masa Berlaku
1	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kota Yogyakarta. 1.20.1.20.04.085.002.5.2.2.31.01	WAHYU TEJO RAHARJA, SE	Yogyakarta 20 Oktober 1969	Sarjana (S1)	Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Surat Keputusan Sekwan, TMT 04-01-2016 s/d 31-12-2016
2	SDA	ANDIE KARTALA, S.Pd.	Kulon Progo, 13 Juni 1978	Sarjana (S1)	Tenaga Ahli Fraksi Partai PDI Perjuangan	Surat Keputusan Sekwan, TMT 04-01-2016 s/d 31-12-2016
3	SDA	DERITIAWAN IBNU TITTYANTO	Yogyakarta, 10 Juli 1972	Sarjana (S1)	Tenaga Ahli Fraksi Partai Amanat Nasional	Surat Keputusan Sekwan, TMT 04-01-2016 s/d 31-12-2016
4	SDA	EDY PRAYITNO, SH	Yogyakarta 17 Mei 1976	Sarjana (S1)	Tenaga Ahli Fraksi Partai Golongan Karya	Surat Keputusan Sekwan, TMT 04-01-2016 s/d 31-12-2016
5	SDA	SETIAWAN, STP	Gresik, 25 April 1986	Sarjana (S1)	Tenaga Ahli Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Surat Keputusan Sekwan, TMT 04-01-2016 s/d 31-12-2016
6	SDA	HARIYANTO, SH	Sleman , 04 Juni 1972	Sarjana (S1)	Tenaga Ahli Fraksi Partai Gerindra	Surat Keputusan Sekwan, TMT 04-01-2016 s/d 31-12-2016

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 7 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO. URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1,423,571,674,119	1,463,656,372,183	40,084,698,064	2.82
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	449,849,108,333	476,161,504,974	26,312,396,641	5.85
1 1 1	Pajak Daerah	274,936,949,000	284,240,000,000	9,303,051,000	3.38
1 1 2	Retribusi Daerah	38,808,143,120	39,322,357,910	514,214,790	1.33
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14,087,531,069	12,938,168,113	(1,149,362,956)	(8.16)
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	122,016,485,144	139,660,978,951	17,644,493,807	14.46
1 2	DANA PERIMBANGAN	669,080,431,984	675,936,408,000	6,855,976,016	1.02
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46,153,980,984	51,228,357,000	5,074,376,016	10.99
1 2 2	Dana Alokasi Umum	622,365,351,000	622,365,351,000	-	-
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	561,100,000	2,342,700,000	1,781,600,000	317.52
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	304,642,133,802	311,558,459,209	6,916,325,407	2.27
1 3 1	Hibah	-	-	-	-
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	99,438,384,802	111,691,710,209	12,253,325,407	12.32
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191,700,999,000	188,613,999,000	(3,087,000,000)	(1.61)
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13,502,750,000	11,252,750,000	(2,250,000,000)	(16.66)
	Jumlah Pendapatan	1,423,571,674,119	1,463,656,372,183	40,084,698,064	2.82
2	BELANJA DAERAH	1,741,299,934,341	1,774,573,915,911	33,273,981,570	1.91
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	854,894,105,743	819,075,942,725	(35,818,163,018)	(4.19)
2 1 1	Belanja Pegawai	783,184,175,315	749,193,037,497	(33,991,137,818)	(4.34)
2 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	56,747,653,900	54,255,149,900	(2,492,504,000)	(4.39)
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	4,736,900,000	4,986,900,000	250,000,000	5.28
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	2,732,794,901	2,585,662,418	(147,132,483)	(5.38)
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	7,492,581,627	8,055,192,910	562,611,283	7.51
2 2	BELANJA LANGSUNG	886,405,828,598	955,497,973,186	69,092,144,588	7.79
2 2 1	Belanja Pegawai	156,067,396,343	162,529,832,651	6,462,436,308	4.14
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	481,237,125,920	502,616,922,530	21,379,796,610	4.44
2 2 3	Belanja Modal	249,101,306,335	290,351,218,005	41,249,911,670	16.56
	Jumlah Belanja	1,741,299,934,341	1,774,573,915,911	33,273,981,570	1.91
	Surplus/(Defisit)	(317,728,260,222)	(310,917,543,728)	6,810,716,494	(2.14)

NO. URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	367,728,260,222	434,671,543,728	66,943,283,506	18.20
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	367,454,571,222	434,397,854,728	66,943,283,506	18.22
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	273,689,000	273,689,000	-	-
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	367,728,260,222	434,671,543,728	66,943,283,506	18.20
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50,000,000,000	123,754,000,000	73,754,000,000	147.51
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	5,000,000,000	-	(5,000,000,000)	(100.00)
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	45,000,000,000	123,754,000,000	78,754,000,000	175.01
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000,000	123,754,000,000	73,754,000,000	147.51
	Pembiayaan Netto	317,728,260,222	310,917,543,728	(6,810,716,494)	(2.14)
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
1.20 1.20.04 143 000	Program Peningkatan Layanan pada DPRD	17,056,124,818	15,411,213,818	(1,644,911,000)	(9.6)	
1.20 1.20.04 143 001	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	1,705,578,000	1,669,818,000	(36,080,000)	(2.1)	
1.20 1.20.04 143 001 5 2 1	Belanja Pegawai	58,050,000	58,050,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,647,528,000	1,611,468,000	(36,060,000)	(2.2)	
1.20 1.20.04 143 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.04 143 003	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	3,046,864,818	1,127,369,818	(1,919,495,000)	(63.0)	
1.20 1.20.04 143 003 5 2 1	Belanja Pegawai	32,800,000	32,525,000	(275,000)	(0.8)	
1.20 1.20.04 143 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,014,064,818	1,094,844,818	(1,919,220,000)	(63.7)	
1.20 1.20.04 143 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.04 143 005	Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD	665,400,000	639,650,000	(25,850,000)	(3.9)	
1.20 1.20.04 143 005 5 2 1	Belanja Pegawai	45,650,000	29,050,000	(16,600,000)	(36.4)	
1.20 1.20.04 143 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	619,750,000	610,500,000	(9,250,000)	(1.5)	
1.20 1.20.04 143 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.04 143 006	Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD	1,606,575,000	1,563,125,000	(43,450,000)	(2.7)	
1.20 1.20.04 143 006 5 2 1	Belanja Pegawai	40,975,000	40,975,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,565,600,000	1,522,150,000	(43,450,000)	(2.8)	
1.20 1.20.04 143 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.04 143 007	Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	777,573,000	827,415,000	49,842,000	6.4	
1.20 1.20.04 143 007 5 2 1	Belanja Pegawai	110,275,000	49,850,000	(60,425,000)	(54.8)	
1.20 1.20.04 143 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	667,298,000	777,565,000	110,267,000	16.5	
1.20 1.20.04 143 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.04 143 008	Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD	164,300,000	161,300,000	(3,000,000)	(1.8)	
1.20 1.20.04 143 008 5 2 1	Belanja Pegawai	830,000	830,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	163,470,000	160,470,000	(3,000,000)	(1.8)	
1.20 1.20.04 143 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.04 143 009	Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD	43,880,000	43,880,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 009 5 2 1	Belanja Pegawai	9,240,000	9,240,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	34,640,000	34,640,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 009 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.04 143 010	Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD	105,324,000	105,324,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 010 5 2 1	Belanja Pegawai	49,940,000	49,940,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 010 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	55,384,000	55,384,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 010 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.04 143 011	Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD	544,080,000	84,495,000	(459,585,000)	(84.5)	
1.20 1.20.04 143 011 5 2 1	Belanja Pegawai	27,500,000	14,525,000	(12,975,000)	(47.2)	
1.20 1.20.04 143 011 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	516,580,000	69,970,000	(446,610,000)	(88.5)	
1.20 1.20.04 143 011 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.04 143 012	Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan	216,950,000	150,050,000	(66,900,000)	(30.8)	
1.20 1.20.04 143 012 5 2 1	Belanja Pegawai	31,350,000	31,350,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 012 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	185,600,000	118,700,000	(66,900,000)	(36.0)	
1.20 1.20.04 143 012 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.04 143 013	Pelaksanaan Reses DPRD	1,930,695,000	1,930,695,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 013 5 2 1	Belanja Pegawai	34,350,000	34,350,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 013 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,896,345,000	1,896,345,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 013 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.04 143 014	Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	5,290,755,000	5,095,567,000	(195,188,000)	(3.7)	
1.20 1.20.04 143 014 5 2 1	Belanja Pegawai	121,275,000	121,275,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 014 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,169,480,000	4,974,292,000	(195,188,000)	(3.8)	
1.20 1.20.04 143 014 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
1.20 1.20.04 143 015	Penyusunan Produk Hukum DPRD	236,025,000	144,800,000	(91,225,000)	(38.7)	
1.20 1.20.04 143 015 5 2 1	Belanja Pegawai	26,400,000	26,400,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 015 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	196,500,000	110,900,000	(85,600,000)	(43.6)	
1.20 1.20.04 143 015 5 2 3	Belanja Modal	13,125,000	7,500,000	(5,625,000)	(42.9)	
1.20 1.20.04 143 018	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD	722,125,000	1,868,125,000	1,146,000,000	158.7	
1.20 1.20.04 143 018 5 2 1	Belanja Pegawai	36,575,000	36,575,000	-	-	
1.20 1.20.04 143 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	685,550,000	1,831,550,000	1,146,000,000	167.2	
1.20 1.20.04 143 018 5 2 3	Belanja Modal					
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	23,450,496,954	21,899,187,861	(1,551,309,093)	(6.6)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(23,450,496,954)	(21,899,187,861)	1,551,309,093	(6.6)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.08.00.00.6.2	PENGLUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	50,000,000,000	123,754,000,000	73,754,000,000	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	5,000,000,000	0	(5,000,000,000)	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	5,000,000,000	0	(5,000,000,000)	Pembentukan Dana Cadangan
1.20.1.20.08.000.000.6.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	45,000,000,000	123,754,000,000	78,754,000,000	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	45,000,000,000	123,754,000,000	78,754,000,000	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
1.20.1.20.08.000.000.6.2.2	Penyertaan Modal: (Investasi) Daerah	45,000,000,000	123,754,000,000	6,000,000,000	PD BPR Bank Jogja PT. BPD DIY 36,000,000,000 87,754,000,000
1.20.1.20.08.000.000.6.2.3	PEMBAYARAN POKOK UTANG	0	0	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	Pembayaran Pokok Utang
1.20.1.20.08.000.000.6.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0	0	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	Pemberian Pinjaman Daerah
	Jumlah Pembiayaan Netto	317,728,260,222	310,917,543,728	(6,810,716,494)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.08.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH				
1.20.1.20.08.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	367,728,260,222	434,671,543,728	66,943,283,506	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARA	367,454,571,222	434,397,854,728	66,943,283,506	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelum	367,454,571,222	434,397,854,728	66,943,283,506	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelum
1.20.1.20.08.000.000.6.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0	0	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	Pencairan Dana Cadangan
1.20.1.20.08.000.000.6.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA	0	0	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.20.1.20.08.000.000.6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0	0	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	Penerimaan Pinjaman Daerah
1.20.1.20.08.000.000.6.1.5	PENERIMAAN KEMBALLI PEMBERIAN PINJAMAN	273,689,000	273,689,000	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	273,689,000	273,689,000	0	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1.20.1.20.08.000.000.6.1.6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0	0	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	Penerimaan Piutang Daerah

ESTIMASI PESERTA RESES DPRD KOTA YOGYAKARTA TA 2015

HARI/TANGGAL : Minggu, 31 Juni 2015
JAM : 19.30 Wib - Selesai
TEMPAT : Balai 10 Bausasran
ACARA : Reses Anggota DPRD atas nama Sdr. SUWARTO

NO	ANGGOTA DPRD	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1	Sdr. SUWARTO	1 orang	Pelaksana Reses
NO	PESERTA (Warga RT/RW/Kel/Kec)	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1	Pengurus RT/RW Klitren	50 Orang	
2	Tokoh Masyarakat Klitren	60 Orang	
JUMLAH TOTAL		110 Orang	

Yogyakarta, 31 Juni 2015

PPTK
KEGIATAN PELAKSANAAN RESES

RAHMI ANGGRAINI, SH, MHUM

PELAKSANA RESES



SUWARTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274)
540651 YOGYAKARTA 55165

Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

LAPORAN HASIL RESES
TAHUN ANGGARAN 2015

Hari/Tanggal : Minggu, 31 Mei 2015
Waktu : 16.00 WIB
Tempat : BSMN SEBAGUNA TEGAL LEMPUYANGAN
Acara : RESES ANGGOTA DPRD KOTA YOGYAKARTA
Pelaksana : SUWARTO

A. PESERTA

Peserta reses sejumlah 37.....peserta sebagaimana terlampir dalam daftar hadir peserta.

B. KESIMPULAN PELAKSANAAN RESES

= Bp. Purnomo mengucapkan banyak trimakasih program KTB bisa dilaksanakan tahun ini

= Ibu Ratna mengucapkan tentang penerimaan siswa baru melalui KTB.

= Bapak Budi memohon bantuan pengabdian Kaca Spinn Jalan Untuk Jalan tikungan di setiap Kampung Bawasan dan Tegal Lempuyangan.

= Bp. Susilo memohon Anggota Dewan untuk bisa selalu hadir di dalam proses musrenbang di tingkat wilayah/kampung.
Apakah bisa menyerap usulan masyarakat secara langsung.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 5406
540651 YOGYAKARTA 55165

Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@in.

LAPORAN HASIL RESES

TAHUN ANGGARAN 2015

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Juni 2015
Waktu :
Tempat : 16.00 WIB BALAI GEMBLAKAN BAWAH
Acara : RESES ANGGOTA DPRD KOTA YOGYAKARTA
Pelaksana : SUWARTO

A. PESERTA

Peserta reses sejumlah 71.....peserta sebagaimana terlampir dalam daftar hadir peserta.

B. KESIMPULAN PELAKSANAAN RESES

Dalam Reses kali ini Suwarto lebih mendekati diri di wilayah kampungnya Gembakan Bawah yang mendengar suara rakyat besar yaitu:

- Dari Komunitas Manung
- Dari Kelompok Pengajian
- Dari Ibu PKK
- Dari Pemuda

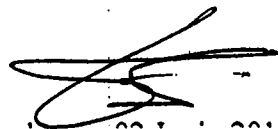
• Andy mewakili pemuda memohon pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan oleh Dinas agar menghilangkan syarat kepemilikan KMS. agar pesertanya tidak itu-itu terus.

= Ibu Risa mengalokasikan untuk anak yang putus sekolah bisa di berikan beasiswa paket dengan sistem di wilayah nya (kampung/kelurahan) agar tidak malu soal kendala selama ini anak putus sekolah kalau mau ikut kursus - beasiswa paket di luar merasa malu.

= Bapak Primi mengalokasikan pembangunan jembatan Sungai Cate untuk di perbaiki karena hilang - atau hanyut oleh banjir bulan April yang lalu.

= Bapak Kandar mengalokasikan agar tiap RW bisa di berikan wireless / sound puangan . guna menunjang pertemuan kegiatan warga .

Demikian laporan hasil pelaksanaan reses kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


SUWARTO

LAPORAN HASIL RESES TAHUN ANGGARAN 2015

Hari / Tanggal : Selasa / 30 Mei 2015
Waktu : 19.05 WIB –21.25 WIB
Tempat : Balai Serbaguna RW 11 Kepuh, Klitren
Acara : Kegiatan Reses Anggota Dewan DPRD Kota Yogyakarta
Pelaksana : Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.

A. Peserta reses sejumlah 72 peserta sebagaimana terlampir dalam daftar hadir peserta.

B. KESIMPULAN PELAKSANAAN RESES

Tema : Dari Kampung Kita Wujudkan Yogya Istimewa

Moderator : Bp. Wahyudi

1. Pembukaan.
2. Doa.
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
4. Sambutan – sambutan :
 - a. Sambutan dari RT /RW wilayah setempat atau yang mewakili.
 - b. Sambutan dari Lurah atau yang mewakili.
 - c. Sambutan dari Camat atau yang mewakili.
5. Acara Inti : Pemaparan Reses Bp. Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.
6. Sesi Tanya Jawab.
7. Penutup.

1. Pembukaan.

Acara dibuka pada pukul 19.05 WIB oleh moderator dilanjutkan dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

2. Sambutan – sambutan.

Sambutan dari Bp. Sukiman sebagai perwakilan dari Pengurus RW 11 Kepuh. Reses ini sangat bermanfaat bagi warga untuk memberikan keluhan, aspirasi dan gagasan guna pembangunan pemerintah kota Yogyakarta.

3. Acara Inti disampaikan oleh Bp. Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.

Reses merupakan agenda anggota DPRD diluar sidang yang ditujukan sebagai sarana untuk menampung segala aspirasi masyarakat baik dalam bidang pembangunan, sosial, budaya maupun ekonomi.

Reses yang I dilaksanakan di Iromejan Kelurahan Klitren, Komplek Mawar Kelurahan Baciro, Kembangan Kotabaru dan Pengok Blok K Kelurahan Demangan. Di wilayah-wilayah tersebut sudah banyak bermunculan masukan-masukan yang besar manfaatnya bagi wilayah-wilayah masing-masing. Sebagai contoh di Iromejan sekarang sudah menjadi kampung tanggap bencana.

Reses gelombang II ini dilakukan di Kepuh, Krasak, Sapen dan Baciro Utara. Diharapkan warga kepuh bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyampaikan usulan-usulan untuk kemajuan warga masyarakat.

4. Sesi Tanya Jawab.

1) Bapak Sukirjan warga Kepuh RT 41 RW 11.

Pertanyaan : Tentang BPJS. Dahulu pemerintah menghimbau warga supaya mendaftar menjadi anggota BPJS. Setelah mendaftar dan mendapat kartu, bulan pertama sampai kelima iuran dibayar secara manual ke Bank Mandiri atau BRI. Tetapi pada bulan ke 6 tidak lagi bisa dibayarkan secara manual dan harus melalui debet rekening dan iuran dipotong tiap bulannya melalui rekening tersebut. Tetapi pembayaran jadi membengkak. Yang tadinya per bulannya hanya membayar sejumlah tanggungannya

saja, sekarang ada tambahan pembayaran per kartu sejumlah Rp.12.000,00. Warga merasa terbebani dengan hal itu. Dan merasa kecewa karena sudah mengikuti program pemerintah tetapi tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Mohon Bapak Fokki berkenan membantu memberikan penjelasan tentang hal tersebut.

Tanggapan disampaikan oleh Bp. Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.

Sejak dulu saya (*Bp. Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.*) tidak menyetujui dengan adanya program pemerintah tentang BPJS yang mewajibkan iur bayar kepada warga masyarakat, karena secara konstitusi hal tersebut sudah melanggar konstitusi. Dari dahulu saya (*Bp. Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.*) sudah menyarankan kepada warga untuk tidak mengikuti program BPJS dulu, sebelum program dan pelaksanaannya jelas. Sampai saat ini program BPJS masih terus di kaji dan dibenahi.

Karena sampai saat ini dan sampai nanti tahun 2019 Jamkesda kota masih berlaku, tanpa harus mendaftar. Cukup dengan menunjukkan KTP dan C1 pada petugas.

Dari rentang masa itu akan mengadakan komunikasi dengan Kemensos tentang validasi data yang ada saat ini sehingga dana yg ada benar-benar bisa tepat sasaran. Dewan juga berkomunikasi dengan pemerintah propinsi supaya apabila jamkesda tidak lagi ada dan warga masyarakat wajib mendaftar BPJS maka iur bayarnya supaya bisa ditanggung oleh APBD kota dan APBD propinsi. Saran dari Bp. Fokki, apabila masyarakat merasa keberatan dan direpotkan oleh BPJS, lebih baik iur bayar dihentikan, karena hal tersebut secara tidak langsung mencabut keanggotaannya dari BPJS. Dan apabila perlu pelayanan kesehatan bisa menggunakan jamkesda.

2) Ibu Sulistyowati

Pertanyaan : Tentang Jaminan Kesehatan COB.

1. Bagaimana prosedur penggunaan COB, karena ada permasalahan warga masuk UGD tapi harus ke puskesmas dulu untuk meminta rujukan padahal kondisi sudah benar benar sakit.

2. Di kartu COB ada batas waktu berlakunya kartu tersebut, dimana memperpanjangnya, di instansi mana dan bagaimana alurnya.

Tanggapan disampaikan oleh Bp. Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.

1. Rujukan ada 2 alur, yaitu melalui puskesmas dan melalui UGD itu sendiri. Jadi sebenarnya saat warga sakit dan masuk UGD tidak perlu lagi mencari rujukan dari puskesmas. Sebagai pengalaman, Bp. Subiyatno (warga Klitren Lor) sakit jantung di tahun 2014. Saat itu langsung di bawa ke UGD Rumah Sakit Bethesda. Kemudian ditanya akan menggunakan jaminan kesehatan apa, yang dijawab menggunakan COB. Kemudian pasien langsung dibawa ke ICU untuk perawatan lebih lanjut. Jadi tidak ada masalah dengan pemakaian jaminan kesehatan COB.
 2. COB merupakan program sharing antara pemerintah kota dan pemerintah propinsi. Sampai saat ini COB masih berlaku, meski di kartu sudah habis masa berlakunya. Karena data yang dipakai masih menggunakan data lama. COB masih berlaku sampai tahun 2019.
- 3) Bapak Sukirjan
- Pertanyaan : Di tahun 2013, waktu menjabat menjadi keamanan RW mendapatkan kartu Jamkesda yang masa berlakunya 1 tahun. Setelah tidak menjabat tidak lagi mendapat kartu Jamkesda. Apakah data masih tersimpan dan apakah saat ini masih terdaftar menjadi anggota ?

Tanggapan disampaikan oleh Bp. Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.

Yang mendapatkan kartu saat itu adalah warga yang mendapat jaminan kesehatan COB. Kartu Cuma berlaku selama 1 tahun karena sumber dana yang digunakan dari APBD. Dan APBD dibuat setahun sekali. Setelah 1 tahun program jamkesda dan COB masih berlaku . Bagi warga yang tidak mendapatkan kartu secara langsung masuk di jamkesda. Tanpa harus mempunyai kartu, cukup dengan ktp dan C1.

5) Bapak Sulistyo

- Pertanyaan :
- a. Apakah Bp. Fokki bisa menjembatani masyarakat dalam membuat kartu COB.
 - b. Apakah Bp. Fokki bisa membantu dalam pengadaan penerangan jalan dan tempat sampah di depan rumah.

Tanggapan disampaikan oleh Bp. Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.

- a. Untuk pembuatan COB, masyarakat sudah dibuatkan pada 2 tahun yang lalu. Saat ini COB sudah ditutup dan data yang dipakai masih data yang lama. Bagi yang tidak mendapatkan kartu COB berarti tidak memenuhi kriteria COB. Tetapi tidak perlu khawatir karena masih ditanggung oleh jamkesda. Pada dasarnya COB dan Jamkesda adalah sama yang membedakan cuma anggarannya saja.
- b. Untuk pengadaan tempat sampah bisa mengajukan surat atau proposal yang ditujukan kepada walikota c.q. BLH dan penerangan jalan warga dapat mengajukan surat atau proposal yang ditujukan ke walikota c.q. Kimpraswil.

6) Bapak Sukiman

- a. Tentang Kesehatan. Sebagai rakyat kecil mengharapkan para anggota dewan dapat menyampaikan teknis-teknis supaya warga tidak dipersulit saat berobat ke Rumah Sakit apalagi pada saat-saat darurat. Sebagai contoh saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Pernah mengalami kecelakaan dan saat berobat ke rumah sakit menggunakan BPJS ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan kecelakaan lalulintas tidak ditanggung oleh BPJS tetapi ditanggung oleh Jasa Rahardja. Padahal pengurusan Jasa Rahardja juga rumit. Sebagai contoh, salah satu syarat mengajukan Jasa Rahardja adalah kecelakaan harus ditangani oleh polisi.
Bagaimana caranya supaya saat kecelakaan warga bisa berobat ke rumah sakit tanpa biaya.

- b. Tentang ketertiban parkir di hotel Tickle, adanya bis-bis yang menghalangi pandangan dan membahayakan warga yang keluar dari gang. Juga mengenai sosialisasi awal ke warga saat akan membangun adalah sosialisasi usaha restoran bukan hotel.

Tanggapan diberikan oleh Bp. Fokki Ardiyano, S.I.P.

- a. Sampai saat ini masih berusaha berkomunikasi dengan Mabes Polri. Diharapkan Jasa Rahardja tidak lagi mengurus asuransi kecelakaan dan supaya diserahkan ke daerah-daerah. Tetapi sampai saat ini belum ada kesempatan. Selama pertemuan dengan Mabes Polri belum terlaksana maka belum ada solusi tentang permasalahan ini.
- b. Saat pengajuan ijin mendirikan tempat usaha biasanya selalu ditanyakan ke warga sekitar tentang setuju tidaknya dan sosialisasi tentang usahanya. Karena tanpa sosialisasi dan persetujuan dari warga, ijin tidak akan keluar. Selama data benar-benar valid ijin bisa dicabut. Mengenai parkir akan di tanggapi oleh Bp. Endro Sulaksono, selaku pengurus Paguyuban Parkir se Kota.

Tanggapan Bp. Endro Sulaksono.

Mengenai parkir nanti akan di rapatkan dengan Dishub dan akan dilaporkan di Pokja dan Dishub. Mohon RT, RW setempat membuat surat keberatan yang ditujukan ke Walikota c.q. Kepala Dinas perhubungan.

7) Bp. Amin

- Keluhan :
- a. Saat kerja bakti dilingkungan mencium aroma yang tidak sedap yang diakibatkan adanya kebocoran saluran limbah hotel Tickle.
 - b. Tentang listrik di gang nanas. Saat ini ada kabel yang tingginya sangat minim dan ada bagian kabel yang menumpang paa kabel penyangga tiang listrik. Sudah dilaporkan tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan.

Tanggapan disampaikan oleh Bp. A. Fokki Ardiyanto, S.I.P.

- a. Untuk bau mohon ditunjukkan lokasinya supaya bisa ditindaklanjuti.
- b. Mengenai kabel mohon ditunjukkan pula lokasinya nanti akan dilihat yang akhirnya akan diteruskan ke PLN, karena PLN yang bertanggungjawab.

8) Bp. Sulistiyo

Pertanyaan : Di tanggal 5 Juni nanti rencananya akan ada pertemuan warga dengan kimpraswil yang membahas tentang akan dibuatnya saluran limbah oleh kimpraswil, dan kabar yang beredar kedepannya warga akan dipungut iuran. Apakah kabar tersebut benar adanya?

Dan mengharapkan kesediaan Bp. Fokki untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Tanggapan disampaikan oleh Bp. Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.

Bp. Fokki siap hadir dipertemuan dan apabila nanti ada hal-hal yang memberatkan rakyat akan di diskusikan bersama.

9) Bp. Sumadji

Keluhan : Saluran air limbah di depan hotel Srimanganti setiap hujan turun dan deras, air selalu keluar dengan bau yang sangat menyengat. Hal itu sangat mengganggu warga. Mohon Bp. Fokki bersedia membantu menyampaikan ke kimpraswil.

Tanggapan disampaikan oleh Bp. Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.

Bp. Fokki siap membantu, dan alangkah baiknya kalau disertai surat dari wilayah setempat sehingga mempunyai bukti yang jelas.

5. Penutup.

Acara ditutup pada pukul 21.25 WIB dengan doa.

Demikian laporan hasil pelaksana reses kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Mei 2015

Pelaksana Reses,



A. Fokki Ardiyanto, S.IP.